

**PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA PEMELIHARAAN  
SERTA BELANJA BARANG DAN JASA TERHADAP  
REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DESA**

**Nailatur Rohmah<sup>1</sup>, Oktavima Wisdaningrum<sup>2</sup>, M.Iswahyudi<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas EKonomi, Universitas 17 Agustus 1945  
Banyuwangi

***Abstract***

*This study aims to examine the effect of capital expenditure, maintenance expenditure, and goods and services expenditure on the realization of the village government budget. The basis of this research is the Village Law No.6 which demands village transparency on the realization of DD Budget to the community. The data used in this study are primary data using a questionnaire method. The object of this research is the village government in the electoral area II of Banyuwangi Regency. The number of the objects of this research is 54 villages, and the respondents in this study are the village treasurers. The sample used is full sampling, where all populations are used as criteria and analyzed using classical assumption techniques, multiple linear regression analysis and hypothesis testing.*

*The results of this study partially with the T test shows that capital expenditure has a positive effect on the realization of orchids, maintenance expenditure has no effect on budget realization, and goods and services expenditures have no effect on budget realization, while simultaneously with the F test it shows that capital expenditure, expenditure Maintenance and Expenditures for Goods and Services affect the Budget Realization.*

***Keywords: Capital Expenditures, Maintenance Expenditures, Goods and Services Expenditures, Budget Realization.***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, belanja pemeliharaan, dan belanja barang dan jasa terhadap realisasi anggaran pemerintah desa. Dasar dari penelitian ini adalah UU Desa No.6 yang menuntut transparansi desa atas realisasi Anggaran DD kepada masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode angket. Objek penelitian ini adalah pemerintah desa di daerah pemilihan II Kabupaten Banyuwangi. Jumlah objek penelitian ini adalah 54 desa, dan responden dalam penelitian ini adalah bendahara desa. Sampel yang digunakan adalah full sampling, dimana seluruh populasi dijadikan kriteria dan dianalisis menggunakan teknik asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian ini secara parsial dengan uji T menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran, belanja pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap realisasi anggaran, dan belanja barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap realisasi anggaran, sedangkan secara simultan dengan F pengujian menunjukkan bahwa belanja modal, belanja Pemeliharaan dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran.

**Kata kunci: Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, Belanja Barang dan Jasa, Realisasi Anggaran.**

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah salah satu point penting dalam pencapaian keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Manajemen pemerintahan di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan sedikit bantuan pemerintah pusat. Hal ini berimplikasi pada daerah maupun otonomi desa untuk memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah maupun desa juga memiliki kewenangan dalam mengontrol terlaksananya anggaran daerah (APBD) atau (APBDes) dibawah pengawasan pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang otonom, harus memiliki kemampuan finansial dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berkurangnya ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap pemerintah pusat merupakan salah satu ciri dari daerah yang telah mandiri. Dalam hal perkembangan dan pertumbuhan suatu daerah, pembangunan ekonomi masyarakat adalah hal yang intim karna pertumbuhan ekonomi masyarakat yang baik akan memberikan dampak besar, bukan hanya kepada tingkat

kesejahteraan masyarakat saja namun juga terhadap pendapatan daerah itu sendiri. Selain itu pembangunan infrastruktur yang memadai juga merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Menurut Fitriyati, dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan aset daerah pemerintah daerah maupun desa hendaknya pemerintah membuat perencanaan Anggaran yang merupakan perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.<sup>1</sup> Penyusunan anggaran dalam pembiayaan dalam instansi pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan suatu rencana pembangunan daerah. Karenanya dalam penyusunan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah atau desa pemerintah juga perlu mengkaji histori realisasi anggaran pemerintah pada periode sebelumnya.

Pembangunan Infrastruktur adalah wujud fisik dari sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat terlaksana jika perencanaannya masuk dalam APBD atau APBDes pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses pembangunan yang sangat signifikan. Pada umumnya belanja modal dialokasikan untuk memperoleh aset tetap yang digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Untuk memperoleh kualitas pembangunan infrastruktur yang baik dan bisa memiliki masa manfaat lebih dari 5 tahun hendaknya pemerintah tidak hanya menganggarkan belanja modal, namun juga menganggarkan belanja barang dan jasa dan biaya pemeliharaan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Otonomi Desa**

Menurut Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menerangkan bahwa Desa adalah perkumpulan dari suatu masyarakat yang memiliki atau mengakui adat yang sama, yang memiliki batas wilayah

---

<sup>1</sup> Fitriyati. 2012

kewenangan untuk melaksanakan dan me-manage urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan persetujuan masyarakat, hal asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal sebagai UU Desa yang menjelaskan bahwa sebelum ada atau terbentuknya NKRI maka desa sudah terlebih dulu ada atau terbentuk. Berdasarkan sejarahnya Desa diakui atas dasar UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 yang di Undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495 pada hari dan tanggal itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

### **Alokasi Dana Desa**

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3)

memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan alokasi dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sebagai dana operasionalnya. ADD merupakan dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi desa dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan desa berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratis dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup> Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional

### **Realisasi Anggaran**

Anggaran (budget) adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan biaya atau barang/jasa.<sup>3</sup> Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal penting bagi pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

---

2 Nurcholis. 2011

3 Nafarin. 2013:11

Realisasi adalah suatu proses pelaksanaan rencana kegiatan menjadi nyata adanya dan dapat di pertanggungjawabkan.<sup>4</sup> Realisasi Anggaran merupakan proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Realisasi Anggaran adalah proses perwujudan dari suatu rencana penganggaran yang direncanakan oleh organisasi pada jangka waktu atau periode tertentu guna mewujudkan perencanaan sesuai dengan apa yang ditargetkan.

### **Belanja Modal**

Menurut Komite Standart Akuntansi Pemerintah Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dalam bentuk seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembangunan, pengadaan, atau pembelian aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan harga beli/bangun aset tersebut.

Sedangkan Menurut PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan

---

4 Mardiasmo. 2009:21

sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

### **Belanja Pemeliharaan**

Biaya Pemeliharaan merupakan suatu kewajiban yang timbul akibat pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah yang ditujukan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada sehingga tetap

dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar atau kecilnya aset tersebut.<sup>5</sup> Belanja Pemeliharaan juga disebut sebagai alokasi belanja yang digunakan untuk menjaga aset tetap agar senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya.<sup>6</sup> Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan meskipun tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dimasa mendatang terhadap aset tetap baik dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja biaya tersebut tetap dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan dalam laporan keuangan.

### **Belanja Barang dan Jasa**

Menurut Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bahwa yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang dipasar secara langsung (tunai), dilanjutkan dengan transaksi pembayaran, kemudian membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan.

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

---

5 Fitriyati. 2012

6 Halim. 2010

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/Pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan kelompok dari keseluruhan orang, peristiwa, maupun data yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>7</sup> Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Desa di wilayah Kecamatan Kabat, Songgon, Blimbingsari, Singojuruh dan Rogojampi yang berjumlah 54 Desa. Responden dalam penelitian ini adalah Bendahara Desa.

Sampel merupakan sebagian dari populasi objek data yang dipilih.<sup>8</sup> Sampel juga diartikan sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili keseluruhan populasi yang menjadi sub bab dari populasi tersebut. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *full sampling* atau sample jenuh, dimana seluruh populasi digunakan sebagai sample.

### **Jenis dan Sumber data**

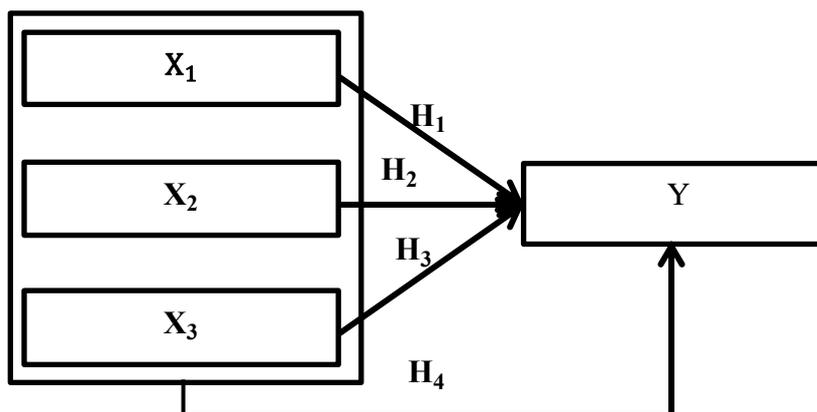
Metode Pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis atau berurutan dalam pengumpulan, perolehan, pencatatan dan penyajian fakta dari data untuk tujuan tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner, dokumentasi dan study pustaka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yang dimulai

---

6 Sularso. 2004

8 ibid

dari angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS).



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

- X<sub>1</sub> : Belanja Modal
- X<sub>2</sub> : Belanja Pemeliharaan
- X<sub>3</sub> : Belanja Barang dan Jasa
- Y : Realisasi Anggaran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yg diukur. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, jika r hitung > r tabel maka butiran pertanyaan (kuesioner) tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Adapaun pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *Coefficiency Correlation Pearson* dalam SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

Tabel 1.1 Uji Validitas Variabel Belanja Modal

No	Pertanyaan	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
1	X1.1	0,630	0,226	Valid
2	X1.2	0,839	0,226	Valid
3	X1.3	0,630	0,226	Valid

4	X1.4	0,607	0,226	Valid
5	X1.5	0,806	0,226	Valid

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Hasil dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa koefisiensi korelasi  $> 0,226$  maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada indikator variabel belanja modal adalah valid.

Tabel 1.2 Uji Validitas Variabel Belanja Pemeliharaan

No	Pertanyaan	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
1	X2.1	0,849	0,226	Valid
2	X2.2	0,567	0,226	Valid
3	X2.3	0,633	0,226	Valid
4	X2.4	0,846	0,226	Valid
5	X2.5	0,638	0,226	Valid

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Hasil dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa koefisiensi korelasi  $>$  dari 0,226 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada indikator variabel belanja pemeliharaan adalah valid.

Tabel 1.3 Uji Validitas Variabel Belanja Barang dan Jasa

No	Pertanyaan	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
1	X3.1	0,884	0,226	Valid
2	X3.2	0,821	0,226	Valid
3	X3.3	0,575	0,226	Valid
4	X3.4	0,821	0,226	Valid
5	X3.5	0,870	0,226	Valid

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Hasil dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa koefisiensi korelasi  $>$  dari 0,226 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada indikator variabel belanja barang dan jasa adalah valid.

Tabel 1.4 Uji Validitas Variabel Realisasi Anggaran

No	Pertanyaan	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
1	Y1	0,699	0,226	Valid
2	Y2	0,783	0,226	Valid

3	Y3	0,613	0,226	Valid
4	Y4	0,699	0,226	Valid

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Hasil dari tabel 1.4 dapat diketahui bahwa koefisiensi korelasi > dari 0,226 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada indikator variabel realisasi anggaran pemerintah desa adalah valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan teknik *Alpha Cronbach*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal atau reliabel bila memiliki koefisiensi kehandalan atau *alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Uji Reliabilitas Penelitian Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan,

No	Variabel	Koefisien <i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
1	Belanja Modal	0,735	Reliabel
2	Belanja Pemeliharaan	0,752	Reliabel
3	Belanja Barang dan Jasa	0,859	Reliabel
4	Realisasi Anggaran	0,638	Reliabel

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Menurut data diatas disimpulkan bahwa seluruh variabel dengan pertanyaan yang diajukan menunjukkan hasil koefisiensi *alpha cronbach* yang muncul > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner memiliki reliabilitas atau dapat disebut handal.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Residual

Tabel 1.6 Uji Normalitas K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Standardized Residual		
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,97128586

Most Extreme	Absolute	,171
Differences	Positive	,067
	Negative	-,171
Kolmogorov-Smirnov Z		1,257
Asymp. Sig. (2-tailed)		,085

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar dengan normal apabila nilai sig,  $> 0,05$ . Dari hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa nilai sig adalah  $0,085 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residu terstandarisasi dapat dikatakan menyebar secara normal (berdistribusi normal).

### Uji Multikolinearitas

Tabel 1.7 Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	BM	,427	2,343
	BP	,669	1,494
	BBJ	,372	2,685

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Berdasarkan output *coefficients* (Tabel 4.9) nilai VIF untuk Belanja Modal ( $X_1$ ), Belanja Pemeliharaan ( $X_2$ ), dan Belanja Barang dan Jasa ( $X_3$ ) memiliki nilai  $< 5$ , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak menghadapi masalah multikolonieritas.

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1.8 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	5,355	1,110			4,824	,000
1 BM	-,122	,065	-,345		-1,872	,067
BP	-,043	,054	-,117		-,794	,431
BBJ	-,041	,063	-,131		-,662	,511

a. Dependent Variable: abs\_res

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Tabel diatas menunjukkan jika nilai sig belanja modal, belanja pemeliharaan serta belanja barang dan jasa lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  atau  $-t$  Tabel  $< t$  Hitung  $< t$  Tabel maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Berganda

Tabel 1.9 Tabel Output Analisis Regresi Linier

Model	Coefficients <sup>a</sup>				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	10,421	2,215			4,705	,000
1 BM	,313	,130	,452		2,406	,020
BP	,186	,109	,257		1,714	,093
BBJ	-,104	,125	-,168		-,836	,407

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Variabel dependen pada model regresi linier berganda ini adalah realisasi anggaran (Y) sedangkan variabel independennya adalah belanja modal (X1), belanja pemeliharaan (X2) dan belanja barang dan jasa (X3). Model regresi berdasarkan hasil analisis ini adalah :

Berdasarkan tabel 1.9 dapat diketahui bahwa nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 10,421, beta ( $\beta_1$ ) sebesar 0,313 bertanda positif, beta ( $\beta_2$ ) sebesar 0,186 bertanda positif, beta ( $\beta_3$ ) sebesar -0,104 bertanda negatif. Sehingga didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 10,421 + 0,313 x_1 + 0,186 x_2 - 0,104 x_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagaimana berikut :

- Koefisien konstanta sebesar 10,421 menunjukkan bahwa, jika variabel independen bernilai 0 maka variabel dependen bernilai 10,421.
- Koefisien konstanta sebesar 0,313. Hal ini menunjukkan bahwa, Jika nilai Belanja Modal ( $X_1$ ) naik 1 satuan maka nilai Realisasi Anggaran Pemerintah Desa (Y) akan bertambah sebesar 0,313 satuan.
- Koefisien konstanta sebesar 0,186. Hal ini menunjukkan bahwa Jika nilai Belanja Pemeliharaan ( $X_2$ ) naik 1 satuan maka nilai Realisasi Anggaran Pemerintah Desa (Y) akan bertambah sebesar 0,186 satuan.
- Koefisien konstanta sebesar - 0,104. Hal ini menunjukkan bahwa Jika nilai Belanja Barang dan Jasa ( $X_3$ ) naik 1 satuan maka nilai Realisasi Anggaran Pemerintah Desa (Y) akan berkurang atau turun sebesar 0,104 satuan.

## Uji Hipotesis

### Uji F

Tabel 4.14 Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18,610	3	6,203	5,433	,003 <sup>b</sup>
	Residual	57,093	50	1,142		
	Total	75,704	53			

a. Dependent Variable: Total\_Y

b. Predictors: (Constant), BBJ, BP, BM

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

## Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Barang dan Jasa terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa

Hasil dari uji F menunjukkan nilai f Hitung  $5,433 > 2,79$  maka  $H_0$  ditolak artinya pada tingkat kepercayaan 95% secara keseluruhan antara variabel independen (belanja modal, belanja pemeliharaan serta belanja barang dan jasa ) berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (realisasi anggaran pemerintah desa).

### Uji T

Tabel 4.15 Uji T

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,421	2,215		4,705	,000
1 BM	,313	,130	,452	2,406	,020
BP	,186	,109	,257	1,714	,093
BBJ	-,104	,125	-,168	-,836	,407

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

#### 1. Belanja Modal (X1)

$t_{Hitung} > t_{Tabel} = 2,406 > 1,675$

$Sig = 0,020 > 0,05$

Kesimpulannya:  $t_{Hitung} X1 (2,406) > t_{Tabel} (1,675)$  atau  $Sig (0,020) < (0,05)$  maka secara parsial Belanja Modal (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa (Y). Ini menunjukkan bahwa besar kecilnya belanja modal dipengaruhi secara langsung oleh realisasi anggaran pemerintah desa, semakin besar belanja modal maka akan semakin besar pula realisasi anggaran dan begitu pula sebaliknya.

## 2. Belanja Pemeliharaan (X2)

$$t \text{ Hitung} > t \text{ Tabel} = 1,714 > 1,675$$

$$\text{Sig} = 0,093 > 0,05$$

Kesimpulannya :  $t \text{ Hitung X2 (1,714)} > t \text{ Tabel (1,675)}$  namun nilai  $\text{Sig (0,093)} > (0,05)$  maka secara parsial Belanja Pemeliharaan (X2) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa (Y). Ini menunjukkan bahwa besar kecilnya realisasi anggaran tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh belanja pemeliharaan, hal ini dikarenakan belanja pemeliharaan tidak setiap tahun selalu ada, karena untuk asset pemerintah desa yang masih bagus dan masih bisa digunakan tidak akan memerlukan biaya pemeliharaan.

## 3. Belanja Barang dan Jasa (X3)

$$t \text{ Hitung} > t \text{ Tabel} = -0,836 < 1,675$$

$$\text{Sig} = 0,407 > 0,05$$

Kesimpulannya :  $t \text{ Hitung X3 (-0,836)} < t \text{ Tabel (1,675)}$  atau  $\text{Sig (0,407)} > (0,05)$  maka secara parsial Belanja Barang dan Jasa (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa (Y). Ini menunjukkan bahwa besar kecilnya belanja barang dan jasa tidak dipengaruhi oleh realisasi anggaran pemerintah desa, sehingga sebesar apapun belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah desa, tidak akan mempengaruhi besar kecilnya realisasi anggaran pada pemerintahan desa tersebut.

## Uji R square

Tabel 4.16 Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,496 <sup>a</sup>	,246	,201	1,069

a. Predictors: (Constant), Total\_X3, Total\_X2, Total\_X1  
Sumber : Output SPSS (Diolah tahun 2021)

Angka Korelasi Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan kejadian sebenarnya. Dari output komputer pada lampiran di peroleh nilai R adalah sebesar 0,496 artinya variable X memiliki hubungan sedang terhadap variable Y. Sedangkan nilai  $R^2$  adalah  $0,246 = 26\%$  jadi dapat diartikan bahwa variabel independen (belanja modal, belanja pemeliharaan, dan belanja barang dan jasa) mempengaruhi variabel dependen (realisasi anggaran) hanya sebesar 49,6% sisanya tidak dijelaskan oleh model.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil dari Uji F dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen (belanja modal, belanja pemeliharaan serta belanja barang dan jasa ) berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (realisasi anggaran pemerintah desa) hal ini dibuktikan dari hasil analisis uji F bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$ .
2. Hasil analisis secara parsial (uji t) diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial Belanja Modal dipastikan berpengaruh secara signifikan terhadap Realisasi Anggaran (Y), sedangkan belanja pemeliharaan ( $X_2$ ) serta belanja barang dan jasa ( $X_3$ ) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa (Y).
3. Hasil dari analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat disimpulkan bahwa variable X (belanja modal, belanja pemeliharaan, serta belanja barang dan jasa) memiliki hubungan sedang terhadap variable Y (realisasi anggaran pemerintah desa).

## **SARAN**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas berikut adalah saran yang dapat disampaikan :

1. Belanja modal merupakan alat pertimbangan dalam penyusunan anggaran pemerintah desa dan berpengaruh dalam mewujudkan realisasi anggaran

pemerintah desa, hendaknya pemerintah desa harus benar – benar mempertimbangan semua komponen belanja modal yang hendak di anggarkan pada tahun berjalan agar memberikan output yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Dalam menunjang efisiensi, efektifitas dan menekan nilai ekonomis operasional publik dan non publik hendaknya pemerintah desa lebih memperhatikan penganggaran belanja pemeliharaan mengingat dalam proses penelitian ini, peneliti masih banyak menemukan minimnya fokus pemerintah dalam menganggarkan biaya pemeliharaan aset yang telah ada, melainkan fokus pada anggaran baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani dan Yuliantoro. 2012. “*Analisis Pengaruh Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal dan Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan dalam Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta tahun 2006 – 2010. Jurnal Reksa*”. Vol 1, No. 1.
- Cahyono, Teguh. 2014. “*Perancangan Basis Data Sistem Informasi Perhitungan ASB(Analisis Standar Belanja) Pemerintah Daerah*”. Jurnal Telematika Vol. 7 No.2.
- Fitriyati. 2012. “*Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah*”. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Halim, Abdul. 2007. “*Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*”, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. “*Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*”, Edisi Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Iswahyudin. 2019. “*Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*”. Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 6.
- Lembaran Negara Ri. 1999. “*Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*”.
- Mardiasmo. 2017. “*Akuntansi Sektor Publik., Edisi Terbaru*”. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurhaeni. 2019. “*Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada Ekuitas Dana*”. Jurnal Katalogis. Volume 4 Nomor 4.
- Nurhidayati dan Yaya. 2013. “*Alokasi Dana Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik : Praktik di Pemerintahan Daerah*”. JAAI Vol 17 No. 2.
- Nugraeni. 2011. “*Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap*

*Prediksi Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*". Akmenika UPY. Volume 8

Nursepti, Kuniawati A. & Yulianto, Rohmad. 2012. "*Analisis Pengaruh Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal dan Pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan dalam Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah & Provinsi DI. Yogyakarta*". Jurnal Reksa Vol.1 No.1